

NETWORK GOVERNANCE DALAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI LANSIA TERLANTAR DI KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA

Jhounathan Calvin Pratama silaen
NPP. 32.0075

*Asdaf Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata
Pamong*

Email : jhounathansilaen03@gmail.com

Pembimbing skripsi: Dr. H. Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, M.AP

ABSTRACT

Problem Statement (Gap): *The increasing life expectancy of Indonesia's population brings the consequence of a growing number of elderly people. This is also directly proportional to the rising number of neglected elderly individuals. Therefore, there is a need for collaboration in implementing social policies aimed at protecting the neglected elderly. This collaboration can be initiated by the Social Service Department in cooperation with other relevant departments and local government units such as the village, sub-district, or urban village authorities. Purpose:* This study aims to identify the collaboration among actors contributing to the protection and social rehabilitation efforts for neglected elderly people in Pematangsiantar. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. **Results:** The study shows active involvement of multiple actors with interrelated roles. The Social Affairs Office plays a central role in program coordination, while sub-districts and urban villages are essential for identifying and recording neglected elderly individuals at the local level. Non-governmental organizations and private parties contribute through service provision and resource support. Coordination among actors is maintained through regular forums and information exchange. However, the study also identifies barriers such as limited resources and coordination challenges, which must be addressed to enhance the effectiveness of network governance. **Conclusion:** Network governance in the protection and social rehabilitation of neglected elderly individuals in Pematangsiantar City involves collaboration among the Social Affairs Office, sub-districts, urban villages, non-governmental organizations, and private parties, with the Social Affairs Office serving as the main coordinator. The challenges faced include limited human resources and facilities, which affect service quality and coordination effectiveness. To address these issues, the Social Affairs Office is enhancing coordination, strengthening human resource capacity, and building cross-sector partnerships to optimize the protection and rehabilitation of neglected elderly individuals.

Keywords: *Network Governance, Social Protection, Neglected Elderly*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia membawa konsekuensi bertambahnya jumlah lanjut usia, Hal ini juga berbanding lurus dengan meningkatnya angka lansia terlantar. Oleh karena itu perlu adanya kolaborasi dalam mengimplementasikan kebijakan sosial dalam rangka perlindungan lansia terlantar. Kolaborasi ini dapat diinisiasi oleh

Dinas Sosial dengan dinas sektoral lainnya dan pemerintahan desa atau Kecamatan ataupun kelurahan setempat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kolaborasi antar aktor yang berkontribusi pada upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial lansia terlantar di Kota Pematangsiantar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil:** penelitian ini menunjukkan adanya keterlibatan aktif berbagai aktor dengan peran yang saling terkait. Dinas Sosial memegang peran sentral dalam koordinasi program, sementara kecamatan dan kelurahan berperan penting dalam identifikasi dan pendataan lansia di tingkat wilayah. Organisasi non-pemerintah dan pihak swasta memberikan kontribusi melalui penyediaan layanan dan sumber daya. Koordinasi antar aktor terjalin melalui forum rutin dan pertukaran informasi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan tantangan koordinasi yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas network governance. **Kesimpulan:** Network governance dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar di Kota Pematangsiantar melibatkan kolaborasi antara Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, organisasi non-pemerintah, dan pihak swasta, dengan Dinas Sosial sebagai koordinator utama. Hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, yang berdampak pada kualitas layanan dan efektivitas koordinasi. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Sosial melakukan peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas SDM, serta menjalin kemitraan lintas sektor guna mengoptimalkan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar.

Kata Kunci : Network Governance, Perlindungan sosial, Lansia Terlantar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

perlindungan sosial merupakan bagian penting dari pembangunan kesejahteraan sosial (Rahman,2018), serta pengentasan kemiskinan dan kesenjangan di negara. fluktuasi angka kemiskinan setiap tahun memengaruhi kesejahteraan sosial yang erat kaitannya dengan perlindungan sosial, karena kemiskinan mencerminkan kesenjangan sosial yang relevan dalam konteks perlindungan sosial (Rahman,2020). Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan berbagai jenis perlindungan dari pemerintah supaya mereka dapat bertahan dalam situasi yang penuh kerawanan bencana, kerentanan sosial an ekonomi dan berbagai intabilitas risiko, terlebih lagi masyarakat rentan dan miskin sangat membutuhkan program-program perlindungan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi persoalan penghidupan dan berbagai guncangan ekonomi (Eviany & Setiyo, 2023).

Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa anak-anak telantar dan fakir miskin dilindungi oleh negara dan negara harus membangun sistem jaminan sosial dan perlindungan yang merupakan masalah nasional. Meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia membawa konsekuensi bertambahnya jumlah lanjut usia, sehingga sangat penting adanya perlindungan sosial bagi lansia (Hermawati, 2015). Salah satu instrumen penting untuk penduduk lanjut usia adalah bantuan sosial, instrumen ini paling umum digunakan oleh negara dengan pendapatan tinggi dan menengah. Sistem bantuan sosial ini menjadi landasan dalam perlindungan sosial (Kidd, 2018).

Dengan adanya perlindungan sosial bagi lansia maka perlu adanya tindak lanjut yaitu rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar.

Rehabilitasi sosial lansia terlantar juga merupakan salah satu suatu proses menyeluruh yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial lansia yang mengalami penelantaran. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi dan menilai kebutuhan lansia, termasuk kesehatan fisik, mental, dan dukungan sosial, kemudian bekerja dengan staf medis, psikolog, dan pekerja sosial untuk mengembangkan rencana intervensi dan merancang program yang komprehensif. Sayangnya jaringan pemerintahan untuk perlindungan sosial bagi Lansia di Kota Pematangsiantar masih kurang maksimal. Dengan melakukan sosialisasi, komunikasi, kerja sama, dan koordinasi lintas sektor yang lebih intensif, serta mengembangkan jaringan dengan berbagai lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan lanjut usia, antara lain dengan dinas sektoral, rumah lansia, pekerja sosial, rumah sakit, pekerja kesehatan serta lembaga swadaya masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat berjalan dengan optimal (Purnaningsih, 2011).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kajian dan data yang telah dijelaskan dalam latar belakang, diketahui bahwa kebijakan perlindungan sosial di Indonesia telah mengalami kemajuan secara kuantitatif, ditandai dengan meningkatnya alokasi anggaran dan perluasan jangkauan sasaran. Namun, permasalahan implementatif masih menjadi hambatan utama dalam pencapaian efektivitas program, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia terlantar. Pada penelitian sebelumnya yang di ungkapkan oleh Firta Emilia Putri (2023) dan Anisya Marselia Putri (2022), lebih menyoroti peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial lansia serta menempatkan faktor keluarga sebagai penyebab utama terjadinya penelantaran. Namun demikian, pendekatan tersebut belum secara komprehensif mengkaji bagaimana mekanisme kerja sama lintas sektor antara Dinas Sosial dengan instansi pemerintahan lain, seperti kecamatan dan kelurahan, dalam konteks pelaksanaan kebijakan perlindungan dan rehabilitasi sosial lansia. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan dalam kajian mengenai bagaimana kolaborasi institusional dapat membentuk sebuah sistem tata kelola jejaring (network governance) yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan lansia terlantar.

Penelitian terdahulu umumnya belum menyentuh secara spesifik persoalan keterbatasan komunikasi, koordinasi, dan sumber daya antar instansi dalam konteks lokal seperti di Kota Pematangsiantar, yang memiliki angka lansia cukup tinggi dan menjadi daerah dengan umur harapan hidup tertinggi di Sumatera Utara. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan teori network governance sebagai perspektif utama dalam menganalisis dinamika antaraktor pemerintahan di tingkat lokal dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. Pendekatan ini penting untuk menilai efektivitas hubungan koordinatif dan distribusi peran di antara lembaga-lembaga yang terlibat. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memusatkan perhatian pada bentuk, tantangan, dan peluang dalam pelaksanaan network governance antara Dinas Sosial dan pemerintahan tingkat kecamatan maupun kelurahan di Kota Pematangsiantar dalam upaya melindungi dan merehabilitasi lansia terlantar. Fokus ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu tetapi juga relevan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti di daerah yang menghadapi tekanan demografis akibat meningkatnya populasi lansia.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang relevan guna memperkuat landasan teoritis dan membedakan posisi penelitian secara akademik. Beberapa penelitian terdahulu mengkaji tema serupa, yakni jaringan pemerintah dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar, namun dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda. Salah

satunya penelitian dari Yanuardi dan Ahdiyana (2017) dalam penelitiannya *mengevaluasi kebijakan sosial terhadap lansia terlantar (LUT) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Mereka menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa kebijakan yang ada belum mencapai hasil yang optimal, karena hanya menjangkau sekitar 11,58% dari total lansia terlantar. Persamaan penelitian ini dengan kajian yang dilakukan penulis terletak pada fokus objek lansia terlantar, sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, di mana penelitian tersebut menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan. Selanjutnya, Pratiwi dan Laksana (2023) meneliti *strategi komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan program lanjut usia terlantar di Sendangmulyo*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menunjukkan adanya perbaikan kualitas program dari tahun ke tahun sebagai hasil dari strategi komunikasi yang diterapkan. Kesamaan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, yakni kualitatif deskriptif, sementara perbedaannya berada pada teori dan lokus penelitian, yang berfokus pada strategi komunikasi.

Qamariah (2020) juga melakukan penelitian dengan *pendekatan kualitatif untuk melihat implementasi program bantuan sosial bagi lansia terlantar di Kota Batu*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Sosial menjalankan layanan rehabilitasi dasar dan program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) sesuai kebutuhan. Fokus dari penelitian ini adalah pada bantuan sosial, yang menjadi pembeda dari penelitian penulis yang lebih menyoroti perlindungan dan rehabilitasi sosial melalui pendekatan *network governance*. Sementara itu, Utami (2024) dalam penelitiannya menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) untuk *menganalisis proses adaptasi sosial dan pengendalian depresi pada lansia terlantar di Sasana Tresna Werdha*. Ia menemukan bahwa kualitas hidup lansia dipengaruhi oleh dukungan sosial, kondisi fisik-mental, serta lingkungan panti. Meski objek penelitian sama, perbedaannya terletak pada teori, metode, dan lokus yang digunakan, yang dalam hal ini lebih menekankan pada aspek psikososial. Kemudian, Aisyah (2020) meneliti *tingkat kepedulian sosial tokoh masyarakat terhadap lansia terlantar di Desa Pasanggrahan, Purwakarta*, dengan metode kuantitatif deskriptif. Ia menemukan bahwa tingkat kepedulian sosial berada dalam kategori sedang dan belum optimal pada aspek pemahaman, kesadaran, dan kemampuan bertindak. Fokus pada tokoh masyarakat serta metode kuantitatif menjadi pembeda utama dari penelitian penulis.

Kemudian Graham dan Kusumaningrum (2024) meneliti eksplorasi kapasitas tata kelola dalam panti jompo di Indonesia, mengungkapkan tantangan dalam memenuhi kebutuhan lansia akibat keterbatasan sumber daya dan perubahan sosial dengan metode kualitatif deskriptif dengan judul *Stretching the Social Protection System Beyond Capacity: Tensions Between Governance Capacity and Conceptualisations of Elder Care in Nursing Homes in Indonesia*. Kemudian, Williamson dan Roberts (2021) dalam jurnal *Governance networks that strengthen older adults' digital inclusion: The challenges of metagovernance*, Meneliti program nasional di Australia yang bertujuan meningkatkan literasi digital lansia melalui jaringan organisasi komunitas, menyoroti tantangan dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan melalui *network governance* dengan metode Kualitatif deskriptif,

Schinkel (2022) dalam jurnal *Transitioning to network governance in the social services sector: The blending and segregating mechanisms in the hybridization process*, meneliti tentang transisi menuju *network governance* dalam sektor layanan sosial, menyoroti mekanisme yang digunakan untuk menggabungkan dan memisahkan peran berbagai aktor dalam proses hibridisasi tata kelola dengan metode kuantitatif, dan yang terakhir Meijer (2021) dalam jurnal *Nonprofit contracting and partnership in elderly care: A comparison between China and the Netherlands* meneliti tentang raktik kemitraan dan kontrak antara organisasi nonprofit dan pemerintah dalam

layanan lansia di China dan Belanda. Studi ini menyoroti peran *network governance* dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan lansia melalui kolaborasi lintas sektor, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya belum secara spesifik membahas kolaborasi lintas sektor pemerintahan dalam konteks *network governance* untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial lansia terlantar. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan mengkaji sinergi antara Dinas Sosial dan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Pematangsiantar, yang hingga kini masih minim diteliti.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengangkat pendekatan *network governance* (Provan & Kennis, 2008) sebagai perspektif utama dalam menganalisis mekanisme perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar di Kota Pematangsiantar. Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada peran Dinas Sosial atau faktor keluarga sebagai penyebab penelantaran lansia, penelitian ini memperluas cakupan dengan mengkaji keterlibatan lintas sektor, khususnya kerja sama antara Dinas Sosial dan pemerintahan di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antaraktor dalam tata kelola pelayanan sosial yang efektif dan inklusif. Selain itu, lokus penelitian di Kota Pematangsiantar memberikan kontribusi kontekstual yang khas, mengingat daerah ini memiliki angka lansia tinggi dan tingkat umur harapan hidup tertinggi di Sumatera Utara, namun masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan sosial. Dengan menggabungkan aspek teoritis *network governance* dan praktik implementasi kebijakan perlindungan sosial di tingkat lokal, penelitian ini menawarkan perspektif baru dan mendalam yang belum banyak dijelaskan dalam kajian-kajian sebelumnya, serta dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan sosial berbasis kolaboratif dan partisipatif.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Network Governance* dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera utara, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menguraikan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena *network governance* dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial lansia terlantar di Kota Pematangsiantar. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, yang mencakup pejabat Dinas Sosial, camat, lurah, lembaga swadaya masyarakat, serta lansia terlantar itu sendiri. Peneliti memilih informan ini dengan alasan bahwa aktor ini yang paling berwenang dan kompeten dalam mendukung penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas data dengan menggabungkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mengacu pada teori *network governance* dari Provan dan Kenis (2008), yang mencakup dimensi keterlibatan, komitmen, peran, dan mekanisme kolaborasi antaraktor. Untuk menganalisis data, digunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setiap tahap dilakukan secara simultan selama proses penelitian berlangsung. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menggambarkan secara utuh dan kontekstual bagaimana tata kelola jejaring

sosial dibentuk dan diimplementasikan dalam pelayanan sosial bagi lansia terlantar di wilayah penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Network governance* dalam Perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar oleh Dinas Sosial di Kota Pematangsiantar

Provan & Kennis (2008) mengungkapkan bahwa *network governance* dalam keberhasilan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi lansia terlantar didukung oleh beberapa dimensi yakni keterlibatan, komitmen, peran, dan Mekanisme. Dimana keempat dimensi tersebut yang menjadikan dasar serta patokan peneliti untuk menulis hasil penelitian ini sehingga skripsi yang penulis buat lebih terarah.

3.1.1. Keterlibatan

Indikator keterlibatan antar instansi pemerintah dalam dimensi keterlibatan, khususnya terkait pendataan lansia terlantar, terwujud melalui koordinasi yang intensif. Koordinasi ini tercermin dalam rapat koordinasi rutin bulanan antara Dinas Sosial dan kecamatan serta kelurahan, yang berfungsi sebagai wadah untuk membahas kasus lansia terlantar, bertukar informasi, dan merumuskan langkah penanganan bersama. keterlibatan lembaga non-pemerintah dalam perlindungan lansia terlantar di Kota Pematangsiantar juga sangat krusial. LSM berperan sebagai ujung tombak dalam menemukan, membantu, dan mendata lansia terlantar di lapangan.

Mereka memberikan bantuan awal, mengurus administrasi, dan menjadi penghubung antara lansia dengan pemerintah. Kerja sama dengan Dinas Sosial terjalin melalui koordinasi rutin, pertukaran informasi, dan diskusi mengenai masalah-masalah lapangan. Sama halnya bahwa terdapat keterlibatan aktif dan multidimensi dari berbagai aktor dalam penanganan lansia terlantar, yang secara signifikan terhubung dengan dimensi keterlibatan dalam teori *network governance* oleh Provan dan Kenis (2008).

3.1.2. Komitmen

Dinas Sosial Kota Pematangsiantar menunjukkan komitmen organisasi yang mendalam dan terstruktur dalam upaya perlindungan serta rehabilitasi lansia terlantar. Komitmen ini diwujudkan melalui pembangunan sistem pendataan terintegrasi yang memungkinkan pemantauan kondisi lansia secara berkala dan akurat, memastikan tidak ada kasus yang terlewat. keberlanjutan kontribusi sumber daya dari berbagai aktor juga merupakan indikator kunci dalam menilai komitmen terhadap perlindungan dan rehabilitasi lansia terlantar di Kota Pematangsiantar. Komitmen ini tidak hanya diukur dari bantuan sesaat, tetapi dari upaya jangka panjang yang terstruktur. Kecamatan Siantar Utara, sebagai salah satu aktor penting, menunjukkan komitmennya melalui alokasi anggaran rutin, mobilisasi tim relawan, kerja sama dengan puskesmas, dan peninjauan kerja sama dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat.

Hal ini sama dengan yang di ungkapkan oleh Reitner dan Kinicki (2010) bahwa Komitmen mengacu pada tingkat kesungguhan dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh berbagai aktor dalam jaringan tata kelola, demi mencapai tujuan mulia, yaitu perlindungan dan rehabilitasi sosial lansia terlantar. Dimensi ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Komitmen pemerintah tercermin dalam adanya kebijakan dan regulasi yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, serta struktur organisasi yang efektif. Sementara itu, komitmen pihak swasta atau non-pemerintah terwujud dalam bentuk kontribusi sumber daya, partisipasi aktif dalam program,

serta inovasi dalam pengembangan solusi. Kemudian bentuk komitmen ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.

3.1.3. Peran

Dinas Sosial berperan sebagai koordinator dan fasilitator utama, bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, perencanaan program, alokasi anggaran, serta penyediaan layanan rehabilitasi sosial. Kecamatan dan kelurahan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat lokal, berperan sebagai ujung tombak dalam pendataan, penjangkauan, dan pemberian bantuan awal kepada lansia terlantar. Mereka juga berfungsi sebagai mata dan telinga di lapangan, melaporkan kasus-kasus lansia terlantar kepada Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Peran yang jelas dan sinergis antara Dinas Sosial, kecamatan, dan kelurahan ini memastikan bahwa lansia terlantar mendapatkan layanan yang komprehensif dan terpadu, dari bantuan awal hingga rehabilitasi jangka panjang. Begitu juga peran pemimpin jaringan juga sangat krusial dalam koordinasi antar aktor dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi lansia terlantar. Hal ini di perkuat oleh Provan & Kennis (2008) yang mengungkapkan bahwa Jaringan organisasi dalam peran pemerintahan berfungsi sebagai perantara dan memastikan aturan berjalan dengan semestinya. pemimpin jaringan adalah individu yang mengambil peran utama dalam mengarahkan dan mengelola aktivitas jaringan. Peran pemimpin jaringan dalam koordinasi antar aktor menjadi sangat krusial untuk memahami dimensi peran secara keseluruhan. Pemimpin jaringan, dalam konteks ini, merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dan tanggung jawab dalam mengarahkan dan mengelola kolaborasi antar aktor. Peran pemimpin jaringan diukur melalui kemampuannya dalam membangun dan mengkomunikasikan visi dan tujuan bersama kepada seluruh aktor yang terlibat.

3.1.4. Mekanisme

Dinas Sosial Kota Pematangsiantar telah membangun mekanisme kolaborasi yang kuat dan terstruktur. Mekanisme ini mencakup forum koordinasi rutin bulanan yang melibatkan kecamatan, kelurahan, LSM, dan pihak swasta. Dinas Sosial Kota Pematangsiantar juga membangun sistem evaluasi sebagai mekanisme yang melibatkan semua aktor terkait, seperti kecamatan, kelurahan, LSM, dan pihak swasta. Sistem ini didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang disepakati bersama, mencakup aspek-aspek krusial seperti jumlah lansia terlayani, kualitas layanan, dan dampak program terhadap kualitas hidup lansia. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui laporan, catatan, dan survei langsung, memastikan perkembangan program terpantau secara akurat. Provan & Kennis (2008) juga mengungkapkan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari mekanisme organisasi dalam melaksanakan sistem administrasi dan mengatur jalannya organisasi, begitu juga mengungkapkan dengan sistem evaluasi, Provan & Kennis (2008) mengungkapkan bahwa Sistem Evaluasi yang baik merupakan bagian dari mekanisme dan komitmen suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Evaluasi merupakan aspek penting yang melekat dalam pembahasan efektivitas jaringan. Efektivitas jaringan dapat dinilai berdasarkan berbagai kriteria dan perspektif, yang seringkali melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan bersama, efisiensi operasional, dan kepuasan anggota jaringan. Evaluasi dalam konteks ini bersifat kompleks karena melibatkan banyak aktor dengan

kepentingan yang beragam, sehingga mekanisme evaluasi yang partisipatif dan transparan menjadi krusial untuk membangun akuntabilitas dan meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan.

3.2.Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat *network governance* dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi Lansia terlantar oleh Dinas Sosial di Kota Pematangsiantar

Salah satu penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia yang kompeten, maupun sarana dan prasarana yang memadai. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan Dinas Sosial dan aktor terkait lainnya dalam menjalankan program perlindungan dan rehabilitasi secara optimal dan berkelanjutan.

3.2.1. Keterbatasan SDM Dalam Operasionalisasi Teknologi

Kekurangan personel dan kurangnya keterampilan yang relevan secara langsung menghambat kemampuan organisasi maka dapat disimpulkan bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penghambat signifikan dalam upaya maksimalisasi perlindungan dan rehabilitasi sosial lansia terlantar. Kekurangan personel menghambat jangkauan yang lebih luas terhadap populasi lansia yang membutuhkan. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai, terutama dalam penggunaan teknologi untuk pendataan dan penanganan psikologis lansia terlantar, menjadi kendala serius. Ketidakhadiran pelatihan khusus di tingkat Dinas Sosial, kecamatan, maupun LSM semakin memperparah masalah ini, menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas SDM yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan lansia terlantar.

3.2.2. Terbatasnya Infrastrukturnya Yang Dapat Menjangkau Penduduk Di Daerah Terpencil

Dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial lansia terlantar di Kota Pematangsiantar, kekurangan fasilitas, sarana, dan prasarana menjadi kendala nyata yang menghambat efektivitas kerja jaringan tata kelola. Keterbatasan ini dapat dilihat dalam berbagai aspek, dimulai dari ketersediaan tempat penampungan sementara atau rumah singgah yang seringkali tidak mencukupi dan kurang layak, hingga sulitnya akses lansia terhadap fasilitas kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan spesifik mereka. Terbatasnya sarana transportasi yang memadai juga menghambat jangkauan dan mobilitas dalam memberikan bantuan sehingga kurang maksimal dalam penanganan lansia terlantar.

3.3.Upaya Dinas Sosial Kota Pematangsiantar dalam mengatasi faktor-faktor penghambat *network governance* dalam Perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar oleh Dinas Sosial di Kota Pematangsiantar

Upaya ini merujuk pada serangkaian langkah penyelesaian dari faktor-faktor penghambat dalam hal ini adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pematangsiantar dalam mengatasi faktor penghambat dalam *network governance* dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar di kota pematangsiantar.

3.3.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial menyadari krusialnya permasalahan keterbatasan SDM dalam penanganan lansia terlantar dan telah merencanakan serta mengupayakan solusi. Upaya yang ditempuh meliputi pengajuan penambahan formasi pekerja sosial dan tenaga ahli kepada pemerintah daerah untuk mengatasi kekurangan personel. Selain itu, program pelatihan dan workshop secara bertahap

diimplementasikan untuk meningkatkan keterampilan staf yang ada, terutama dalam penggunaan teknologi pendataan dan pemahaman dasar penanganan psikologis lansia. Rencana ke depan juga mencakup pengajuan pelatihan lebih lanjut di bidang-bidang yang diperlukan guna memaksimalkan kinerja SDM dalam menangani lansia terlantar. Meskipun belum optimal, langkah-langkah ini menunjukkan adanya komitmen untuk mengatasi kendala SDM dan meningkatkan efektivitas upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial.

3.3.2. Fasilitas Sarana Dan Prasarana

Dinas Sosial menyadari betapa pentingnya ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai dalam mendukung upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial lansia terlantar. Sebagai respons terhadap kekurangan yang ada, Dinas Sosial berencana untuk mengajukan penambahan anggaran kepada pemerintah daerah, terutama dengan adanya kepala daerah yang baru. Anggaran ini akan dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas di rumah penampungan lansia agar lebih layak dan nyaman, serta untuk menambah fasilitas transportasi. Penambahan transportasi diharapkan dapat meningkatkan mobilitas petugas dalam menjangkau dan memantau lansia terlantar, sehingga kinerja penanganan dapat menjadi lebih maksimal. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran dan rencana tindakan konkret dari Dinas Sosial untuk mengatasi kendala sarana dan prasarana demi meningkatkan efektivitas program.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *network governance* dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar di Kota Pematangsiantar sudah berjalan, namun belum maksimal. Dinas Sosial berperan sebagai aktor utama dalam koordinasi, sedangkan kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting dalam mendata dan mengidentifikasi lansia terlantar di wilayah masing-masing. Meskipun kolaborasi sudah terjalin melalui forum koordinasi dan komunikasi informal, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya keterlibatan aktif dari pihak kelurahan dan masyarakat dalam menyampaikan data terkini tentang lansia terlantar. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, terutama pada tingkat kecamatan dan kelurahan, juga mempengaruhi efektivitas pembaruan data dan penyampaian informasi ke Dinas Sosial.

Dari sisi dimensi *network governance* menurut Provan dan Kenis (2008), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur keterlibatan sudah mulai tumbuh, namun masih perlu diperkuat, terutama dari pihak non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta. Komitmen antarpelaku terlihat dalam bentuk forum rutin, namun belum seluruh pihak menunjukkan konsistensi kontribusi, terutama dalam hal penyediaan sumber daya dan keikutsertaan dalam evaluasi program. Dalam dimensi peran, Dinas Sosial telah menjalankan fungsi sebagai *lead organization*, namun koordinasi lintas sektor masih bersifat vertikal dan belum membentuk pola hubungan horizontal yang ideal antaraktor dalam jaringan. Dari segi mekanisme, sistem evaluasi dan pertukaran data belum berjalan optimal karena kurangnya integrasi sistem informasi dan keterbatasan teknologi di tingkat kelurahan.

Temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor dalam menjawab tantangan kesejahteraan sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia terlantar. Implementasi *network governance* di Kota Pematangsiantar menunjukkan potensi besar jika mampu dioptimalkan dengan penguatan kapasitas SDM, pengembangan platform komunikasi terintegrasi, serta perluasan peran aktor non-pemerintah dalam jaringan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan sosial tidak dapat dijalankan secara sektoral, tetapi menuntut

sinergi yang kuat antarinstansi dan pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka tata kelola jaringan yang transparan, responsif, dan berkelanjutan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Network governance dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar di Kota Pematangsiantar, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. *Network governance* dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar di Kota Pematangsiantar melibatkan kolaborasi antara berbagai aktor, termasuk Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, organisasi non-pemerintah, dan pihak swasta. Dinas Sosial memegang peran sentral dalam mengkoordinasi program-program perlindungan dan rehabilitasi sosial. Kecamatan dan kelurahan berperan penting dalam identifikasi serta pendataan lansia terlantar di wilayah masing-masing.
2. Faktor-faktor yang dapat menghambat *network governance* dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar di Kota Pematangsiantar mencakup keterbatasan sumber daya, baik dari segi sumber daya manusia yang kompeten maupun ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai. Kurangnya SDM secara kualitas dan kuantitas dalam menangani lansia terlantar, Keterbatasan ini dapat mengakibatkan beban kerja yang berlebihan, penurunan kualitas layanan, dan penjangkauan lansia terlantar yang tidak optimal, serta menghambat koordinasi yang efektif antar aktor dalam jaringan tata kelola.
3. Dinas Sosial Kota Pematangsiantar berupaya mengatasi hambatan dalam *network governance* melalui peningkatan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk pelaporan data yang akurat dan intervensi yang efektif, peningkatan kapasitas SDM di tingkat kecamatan dan kelurahan, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan pihak swasta untuk memperluas sumber daya, serta peningkatan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi lintas sektor dan pembentukan jaringan dengan berbagai lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan lanjut usia, dengan tujuan mengoptimalkan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar.

Keterbatasan Penelitian, Dalam proses pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yang mempengaruhi cakupan dan kedalaman hasil penelitian. Pertama, keterbatasan waktu menjadi salah satu kendala utama yang membatasi ruang lingkup pengumpulan data, sehingga intensitas interaksi dengan informan di lapangan tidak dapat dilakukan secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Kemudian keterbatasan akses terhadap data sekunder yang lebih lengkap dan terbaru, khususnya yang berkaitan dengan angka pasti lansia terlantar dan data intervensi lintas sektor di Kota Pematangsiantar, menjadi kendala dalam melakukan analisis kuantitatif pendukung. keterbatasan dalam jumlah dan keragaman informan, khususnya dari sektor swasta dan organisasi non-pemerintah, juga turut memengaruhi variasi perspektif dalam memetakan jaringan *network governance*. Kemudian, karena pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasikan secara menyeluruh untuk daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan birokratis yang berbeda. Meskipun demikian, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini tetap memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pengembangan kebijakan perlindungan sosial, khususnya dalam upaya peningkatan koordinasi lintas sektor bagi kesejahteraan lansia terlantar.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*), Arah masa depan penelitian ini dapat difokuskan pada pengembangan model *network governance* berbasis digital yang mampu mengintegrasikan

data lansia terlantar secara real-time antar instansi terkait, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas intervensi berbasis komunitas dalam rehabilitasi sosial lansia, serta melakukan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak kolaborasi lintas sektor terhadap kualitas hidup lansia secara lebih objektif dan terukur.

V. Ucapan Terimakasih

Peneliti menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing dan dosen penelaah atas bimbingan, ilmu, serta saran dan masukan berharga yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dinas Sosial Kota Pematangsiantar yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian serta berbagi pengalaman dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, khususnya sebagai bekal dalam dunia kerja di masa depan. Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada masyarakat yang turut berkontribusi melalui informasi yang diberikan dalam penelitian ini. Teristimewa, penghargaan mendalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan adik-adik tercinta yang selalu mendoakan, menyemangati, dan memberikan dukungan penuh selama proses penelitian berlangsung.

VI. Daftar Pustaka

- Aisyah, R. N., Rusmana, A., & Hakim, M. Z. (2020). Kepedulian Sosial Tokoh Masyarakat Terhadap Lanjut Usia Terlantar Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 19(2) 240-256
- Eviany, E. & Sutiyo, (2023). *Perlindungan Masyarakat*. Yogyakarta: PT. Nas media Indonesia.
- Graham, J. E., & Kusumaningrum, S. (2024). *Stretching the social protection system beyond capacity: Tensions between governance capacity and conceptualisations of elder care in nursing homes in Indonesia*. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 44(3/4), 276–292. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-12-2023-0322>
- Hermawati, I. (2015). Kajian tentang kota ramah lanjut usia. Yogyakarta: *Badan Pendidikan Dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)*.
- Hu, M., & Meijer, A. (2021). *Nonprofit contracting and partnership in elderly care: A comparison between China and the Netherlands*. *Journal of Chinese Governance*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s43508-021-00009-8>
- Kidd, S., Gelders, B., Rahayu, S. K., Larasati, D., Huda, K., & Siyaranamual, M. (2018). Perlindungan Sosial bagi Penduduk Lanjut Usia di Indonesia. *TNP2K. Jakarta*. <https://www.tnp2k.go.id/filemanager/files/Perlindungan%20Sosial%20Lansia/Elderly%20Brief%20-%20Bahasa%20Indonesia.pdf>
- Noordegraaf, M., van Hulst, M., & Schinkel, W. (2022). *Transitioning to network governance in the social services sector: The blending and segregating mechanisms in the hybridization process*. *Public Management Review*, 24(12), 1812–1830. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2132280>
- Pratiwi, N. Z., & Laksana, N. Y. (2023). Strategi komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan pelaksanaan program lanjut usia terlantar di Sendangmulyo. *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(3), 316-216

- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of Network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252.
- Purnaningsih, Sri, (2011). Analisis Koordinasi Lintas Sektor Pada Komisi Lanjut Usia Kota Yogyakarta Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.(Skripsi Tesis, Universitas Gajah Mada)
- Putri, Firta Emilia, (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Lansia Terlantar Di Provinsi Jawa Timur. (Skripsi Thesis, Universitas Bhayangkara Surabaya)
- Putri, Anisya Marsella (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan. (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Qamariah, M., Afifuddin, A., & Suyeno, S. (2020). Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu). *Respon Publik*, 14(4), 1–7.
- Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/485>
- Rahman, A. dan Utama, L. S. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Covid-19 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 5 (2), 48 – 71. <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/1398>
- Utami, M. W., Rahardjo, T. B. W., & Suratmi, T. (2024). Analisis Proses Adaptasi Sosial dan Pengendalian Depresi dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Terlantar di Sasana Tresna Werdha Dukuh 5, Kramat Jati Tahun 2023-2024. *Jurnal Riset Ilmu Kesehatan Umum Dan Farmasi (JRIKUF)*, 2(4), 38–57.
- williamson, A., & Roberts, K. (2021). *Governance networks that strengthen older adults' digital inclusion: The challenges of metagovernance*. *Government Information Quarterly*, 38(3) <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101575>
- Yanuardi, K. N. F., & Ahdiyana, M. (2017). Evaluasi Kebijakan Sosial Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar (LUT) Social Policy Evaluation on Social Welfare Improvement of Neglected Elderly. *Jurnal PKS: 16(1)*, 1 – 10